



Reserve Brain Drain sebagai Alternatif Mengatasi Kemiskinan

Reserve Brain Drain as an Alternative to Overcome Poverty

Munari Kustanto^{1)a)*}, Fitriyatus Sholihah^{1) a)}

¹⁾Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo

^{a)}Jl. Sultan Agung No. 13 Sidoarjo. 61211. Jawa Timur

*Email: munarikustanto@gmail.com

Naskah Masuk: 4 Pebruari 2020

Naskah Revisi: 31 Maret 2020

Naskah Diterima: 22 April 2020

ABSTRACT

In the period 2010-2019, the poverty rate in East Java Province was always above the national achievements. The other, in the same period of time there was a poverty disparity between rural and urban areas in East Java Province. This study aims to formulate a strategy to overcome poverty disparity in East Java. This study used a descriptive quantitative approach. This study uses secondary data namely poverty, disparity and urbanization data. The analysis shows that urbanization which occurred in East Java pushed migration of the quality human resources in the village. This can be traced from the increasing urbanization of intellectuals and migrants of productive age in East Java in the period 2010-2015. Overcoming poverty inequality between villages and cities is difficult to realize when villages are shortage of human resources to carry out development. Reserve brain is a solution for efforts to restore the village human resources as a capital to carry out development.

Keywords: *disparity; poverty; reserve brain drain.*

ABSTRAK

Angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur selalu berada di atas capaian nasional dalam kurun waktu 2010-2019. Dalam kurun waktu yang sama, terjadi disparitas kemiskinan antara daerah perdesaan dan perkotaan di Provinsi Jawa Timur. Studi ini bertujuan untuk merumuskan strategi mengatasi disparitas kemiskinan di Jawa Timur. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data kemiskinan, disparitas, dan urbanisasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa urbanisasi yang terjadi di Jawa Timur menyedot sumber daya manusia berkualitas di desa. Hal ini terlihat dari meningkatnya urbanisasi intelektual dan migran usia produktif di Jawa Timur dalam kurun waktu tahun 2010-2015. Upaya mengatasi ketimpangan kemiskinan antara desa dan kota sulit terwujud manakala desa semakin kekurangan sumber daya manusia untuk melakukan pembangunan. Reserve brain menjadi sebuah solusi bagi upaya mengembalikan sumber daya manusia desa sebagai salah satu modal untuk melakukan pembangunan.

Kata kunci: *disparitas, kemiskinan, reserve brain drain.*

PENDAHULUAN

Disparitas kemiskinan menjadi permasalahan klasik bagi sebagian besar negara berkembang di dunia. Pada umumnya sebagian besar penduduk miskin dunia tinggal di perdesaan. Kondisi tersebut ditengarai menjadi faktor pendorong terjadinya migrasi dari desa ke kota di banyak negara. Kemiskinan juga

yang seringkali menjadi salah satu faktor penyebab seseorang memutuskan menjadi buruh migran (Aeni, 2017).

Pada tataran domestik, kemiskinan di perdesaan juga menjadi pendorong terjadinya urbanisasi. Data BPS menunjukkan bahwa pada periode 2010-2019 terjadi perbedaan jumlah penduduk miskin dan angka kemiskinan antara perdesaan dan perkotaan baik secara nasional

maupun di Provinsi Jawa Timur (Badan Pusat Statistik, 2019a). Kondisi tersebut secara tidak langsung mengindikasikan adanya disparitas kemiskinan antara perdesaan dan perkotaan. Selanjutnya, data BPS menunjukkan sebagian besar penduduk miskin tinggal di perdesaan. Oleh karena itu, sebagian penduduk desa yang bermigrasi ke perkotaan bertujuan untuk mencari penghidupan yang lebih baik (Macours & Swinnen, 2008).

Masalah pengangguran, disparitas, dan kemiskinan seringkali berkelindan dengan permasalahan urbanisasi. Pada negara berkembang, termasuk Indonesia, urbanisasi bermula dari terjadinya restrukturisasi perekonomian dari pertanian menjadi manufaktur dan jasa, yang selanjutnya diikuti dengan terjadinya transformasi spasial (Christiaensen & Todo, 2013). Urbanisasi pada awalnya diharapkan memberikan dampak positif bagi kawasan perdesaan sehingga membuka peluang bagi pengurangan kemiskinan di perdesaan.

Kenyataan yang terjadi ternyata tidak sesuai dengan harapan. Konsentrasi spasial yang disertai perubahan ekonomi perdesaan menuju ekonomi perkotaan justru menyebabkan terjadinya diferensiasi pendapatan dan kesejahteraan. Kondisi ini menurut Febrianto & Syahbana (2016) berujung pada disparitas antar wilayah serta mengakibatkan efek pemiskinan terhadap wilayah yang tertinggal. Proses pemiskinan tidak dapat dihindari manakala sumber daya wilayah tertinggal semakin tersedot ke wilayah potensial, termasuk didalamnya adalah sumber daya manusia.

Menilik perkembangan tingkat urbanisasi yang terjadi di Indonesia, penyedotan sumber daya manusia perdesaan ke wilayah perkotaan menjadi permasalahan serius. Badan pusat statistik pada tahun 2010 merilis tingkat urbanisasi di Indonesia sebesar 49,8% (Badan Pusat Statistik, 2013). Berdasarkan proyeksi yang dilakukan, maka tingkat urbanisasi meningkat menjadi 72,9% pada tahun 2045. Bahkan untuk beberapa provinsi yang terletak di Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan diproyeksikan memiliki tingkat urbanisasi yang lebih tinggi dari tingkat urbanisasi nasional (Badan Pusat

Statistik, 2018). Dengan demikian, dalam kurun waktu 35 tahun jumlah penduduk perkotaan di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 46,39%.

Permasalahan perpindahan sumber daya perdesaan melalui proses urbanisasi perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak, utamanya terkait dengan peningkatan sumber daya manusia. Arus urbanisasi yang tidak mungkin dihindari diharapkan tidak membuat desa semakin tertinggal. Sebagaimana diketahui bahwa sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang memiliki peranan sangat penting dalam pembangunan.

Menurut Siregar (2017), sumber daya manusia yang berkualitas diperlukan guna mempercepat pembangunan di suatu negara. Demikian pula dengan desa, keberadaan sumber daya manusia berkualitas juga diperlukan bagi upaya pembangunan. Ketiadaan sumber daya manusia berkualitas di desa sebagai dampak urbanisasi tentu menjadikan pembangunan desa terhambat. Apabila kondisi tersebut tidak mendapat perhatian yang serius, maka disparitas kemiskinan antara perkotaan dan perdesaan akan terus berlangsung.

Ancaman kelangkaan sumber daya manusia berkualitas di desa juga terjadi di Provinsi Jawa Timur. Proyeksi penduduk Provinsi Jawa Timur berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2018 menunjukkan bahwa penduduk yang tinggal di perkotaan mencapai 66,7% di tahun 2035. Persentase tersebut lebih tinggi dari rata-rata penduduk perkotaan nasional sebesar 66,6% dan rata-rata penduduk perkotaan Provinsi Jawa Tengah sebesar 60,8% (Badan Pusat Statistik, 2018). Tingginya tingkat urbanisasi dapat mengancam ketersediaan sumber daya manusia berkualitas di desa.

Penanganan masalah akibat urbanisasi terlihat masih belum optimal sehingga keluhan berkaitan dampak urbanisasi terus bermunculan. Ironi terjadi manakala pembangunan di desa masih kurang ekspansif, meskipun telah digelontor dana cukup besar oleh pemerintah (Friana, 2019). Sebagai akibatnya, arus migrasi keluar sumber daya manusia dari desa ke kota menjadi tidak terbandung.

Berdasarkan uraian tersebut, upaya mengatasi kemiskinan di perdesaan tidak dapat dilepaskan dengan permasalahan sosial demografi. Berbagai studi yang telah dilakukan pada umumnya melihat disparitas kemiskinan dari aspek ekonomi. Studi yang secara khusus membahas disparitas kemiskinan di kota dan desa dari aspek sumber daya manusia masih belum banyak dilakukan. Hal ini menjadi penting mengingat modal manusia menjadi bagian yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Penelitian Mankiw, Romer, & Weil (1992) menunjukkan bahwa modal sosial berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Mobilitas sosial dari kota ke desa di Provinsi Jawa Timur tentu memengaruhi upaya mengatasi kemiskinan perdesaan. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan sumber daya manusia berkualitas sebagai elemen penting dalam pembangunan desa. Terhambatnya pembangunan perdesaan selanjutnya mengakibatkan penanganan kemiskinan juga terhambat. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi mengatasi disparitas kemiskinan di Jawa Timur melalui pendekatan penyediaan sumber daya manusia berkualitas dan pembangunan desa.

TINJAUAN PUSTAKA

Disparitas Kemiskinan Nasional

Badan Pusat Statistik (2019a) melaporkan bahwa selama sepuluh tahun terakhir sebagian besar penduduk miskin di Indonesia tinggal di perdesaan. Tercatat pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin perkotaan mencapai 11,10 juta jiwa, sedangkan jumlah penduduk miskin perdesaan sebesar 19,93 juta jiwa. Komposisi tersebut tidak mengalami perubahan per Maret 2019. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di perkotaan pada periode tersebut tercatat 9,99 juta jiwa, sedangkan jumlah penduduk miskin perdesaan mencapai 15,15 juta jiwa.

Angka kemiskinan di kawasan perkotaan juga menunjukkan hasil yang lebih rendah

dibandingkan dengan angka kemiskinan di perdesaan. Angka kemiskinan perkotaan pada tahun 2010 mencapai 9,87%. Hal ini berarti lebih baik dari angka kemiskinan perdesaan yang masih berada pada angka 16,56%. Data per Maret 2019 memperlihatkan penurunan angka kemiskinan, meskipun komposisinya tidak mengalami perubahan. Angka kemiskinan di perkotaan tercatat turun menjadi 6,69% dan angka kemiskinan perdesaan menjadi 12,85%.

Meskipun dari aspek jumlah penduduk miskin lebih banyak berada di perdesaan, penurunan jumlah penduduk miskin di perdesaan memperlihatkan kinerja yang lebih baik, setidaknya pada kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Selama sepuluh tahun terakhir, laju penurunan jumlah penduduk miskin di perdesaan tercatat sebesar 23,98%. Capaian tersebut jauh berada di atas laju penurunan jumlah penduduk miskin di perkotaan pada periode yang sama yang hanya tercatat 10%.

Laju penurunan angka kemiskinan juga menunjukkan pola yang sama. Selama sepuluh tahun terakhir, laju penurunan angka kemiskinan di perkotaan jauh lebih baik jika dibanding penurunan angka kemiskinan di perdesaan. Laju penurunan angka kemiskinan di perkotaan sebesar 32,22%, sedangkan laju penurunan angka kemiskinan di perdesaan selama sepuluh tahun terakhir hanya sebesar 22,40%. Berbagai data yang ada di atas memperlihatkan bahwa terdapat disparitas kemiskinan di perkotaan dengan perdesaan, baik dari segi jumlah penduduk miskin maupun angka kemiskinan.

Disparitas Kemiskinan di Jawa Timur

Disparitas kemiskinan antara kota dan desa juga terjadi di Provinsi Jawa Timur. Data BPS menunjukkan selama sepuluh tahun terakhir sebagian besar penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur berada di perdesaan. Pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin perkotaan tercatat sebesar 1,874 juta jiwa, sedangkan jumlah penduduk miskin di perdesaan mencapai 3,656 juta jiwa.

Jumlah penduduk miskin selama lima tahun terakhir mengalami penurunan, tetapi tidak memengaruhi komposisinya. Data per Maret 2019 memperlihatkan bahwa jumlah penduduk miskin perkotaan menjadi 1,449 juta jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di perdesaan menjadi 2,663 juta jiwa pada periode yang sama.

Laju penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur, baik perkotaan maupun, perdesaan memiliki pola yang sama dengan nasional. Dalam sepuluh tahun terakhir, terlihat bahwa laju penurunan jumlah penduduk miskin di perdesaan masih lebih baik dibandingkan dengan perkotaan. Data yang ada memperlihatkan laju penurunan jumlah penduduk miskin di perdesaan pada periode tahun 2010-2019 sebesar 27,16%. Capaian tersebut jauh di atas laju penurunan jumlah penduduk miskin perkotaan yang hanya tercatat 22,65% pada periode yang sama.

Perkembangan persentase kemiskinan perkotaan dan perdesaan menunjukkan adanya disparitas kemiskinan di Provinsi Jawa Timur selama sepuluh tahun terakhir. Rilis data BPS memperlihatkan bahwa di tahun 2010 angka kemiskinan perkotaan di Provinsi Jawa Timur sebesar 10,58% sementara angka kemiskinan perdesaan mencapai 19,74%. Sepuluh tahun kemudian angka kemiskinan di perkotaan dan perdesaan mengalami penurunan tetapi tetap dengan komposisi yang sama. Data per Maret 2019 memperlihatkan bahwa angka kemiskinan perkotaan Provinsi Jawa Timur turun menjadi 6,84% sedangkan angka kemiskinan perdesaan mencapai 14,43%. Data tersebut memperlihatkan bahwa angka kemiskinan perdesaan dua kali lebih besar dibanding angka kemiskinan perkotaan (Badan Pusat Statistik, 2020).

Selanjutnya, yang perlu juga diperhatikan adalah angka kemiskinan di perkotaan dan perdesaan di Provinsi Jawa Timur. Disparitas juga terjadi di Provinsi Jawa Timur dalam aspek angka kemiskinan mengikuti pola yang sama dengan disparitas di tingkat nasional. Berdasar-

kan data yang ada, angka kemiskinan perkotaan Provinsi Jawa Timur di tahun 2010 sebesar 10,58%. Sementara itu, angka kemiskinan perdesaan di Provinsi Jawa Timur tercatat hampir dua kali lipat yaitu sebesar 19,74%. Penurunan angka kemiskinan yang terjadi sepuluh tahun kemudian ternyata tidak merubah komposisi yang ada. Angka kemiskinan perkotaan di Provinsi Jawa Timur pada Maret 2019 tercatat turun menjadi 6,84%, sedangkan angka kemiskinan perkotaan turun menjadi 14,43%. Angka kemiskinan perdesaan di Provinsi Jawa Timur dengan demikian tercatat dua kali angka kemiskinan perkotaan.

Studi tentang Disparitas Kemiskinan

Tema disparitas cukup banyak dibahas dalam berbagai studi. Penelitian oleh Masfufah (2013) menganalisis dinamika disparitas wilayah dan pembangunan infrastruktur, menguji konvergensi wilayah, serta membandingkan fenomena tingkat konvergensi antara wilayah koridor ekonomi di Indonesia. Selain itu juga menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi disparitas wilayah antara koridor ekonomi di Indonesia periode 2006-2010. Hasil analisis dari Masfufah (2013) menunjukkan bahwa dengan pendekatan PDRB tidak terjadi konvergensi pendapatan tingkat kabupaten/kota di Indonesia. Namun demikian, menggunakan pendekatan pengeluaran rumah tangga dengan teknis estimasi FD-GMM terjadi proses konvergensi. Terjadi konvergensi di setiap koridor ekonomi, baik menggunakan pendekatan PDRB maupun pengeluaran rumah tangga. Konvergensi tercepat terjadi di koridor ekonomi Jawa dengan pendekatan pengeluaran rumah tangga.

Penelitian disparitas dengan lokasi Provinsi Jawa Timur telah dilakukan oleh Lest (2016) dengan tujuan untuk memetakan kondisi pertumbuhan ekonomi, kesenjangan, dan kemiskinan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur (38 Kabupaten/Kota). Penelitian tersebut menggunakan *Principal Component Analysis* (PCA) menunjukkan bahwa beberapa daerah memiliki pembangunan ekonomi yang baik

dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tingkat kemiskinan yang rendah, sehingga tergolong kelompok daerah yang maju dan relatif bertumpu pada sektor perdagangan dan industri (Kabupaten Sidoarjo, Kota Kediri, Kota Madiun, dan Kota Surabaya). Daerah yang memiliki pembangunan ekonomi yang relatif maju terletak di wilayah perkotaan. Di sisi lain, daerah yang memiliki pembangunan ekonomi relatif kurang maju dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang rendah dan tingkat kemiskinan yang tinggi, yaitu Kabupaten Situbondo, Probolinggo, Bojonegoro, Tuban, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Pada umumnya, daerah dengan pembangunan ekonomi yang relatif kurang maju bertumpu pada sektor pertanian dan pertambangan. serta terletak di wilayah perdesaan (Lest, 2016).

Penelitian Istiqamah, dkk. (2018) mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan dan kemiskinan menyimpulkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi menyebabkan peningkatan ketimpangan pendapatan dan jumlah penduduk miskin beberapa provinsi di Indonesia. Penelitian oleh Sugiarto dkk, (2015) mengidentifikasi kemiskinan rumah tangga perdesaan dan menganalisis tingkat kesenjangan pendapatan di Kabupaten Bojonegoro dengan 60 sampel rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka kemiskinan yang tinggi berdasar kriteria ADB dan bank dunia, namun berdasar BPS angka kemiskinan cukup rendah. Berdasarkan Indeks FGT diketahui tingkat kedalaman kemiskinan (*depth of poverty*) sebesar 0,050; sementara tingkat keparahan kemiskinan (*severity of poverty*) sebesar 0,020. Lebih lanjut, tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dalam skala sedang dengan indeks Gini 0,459 (Sugiyarto dkk., 2015).

Reverse Brain Drain

Reverse brain drain adalah pergerakan modal manusia (*human capital*) dari daerah yang lebih maju ke daerah yang kurang berkembang, dalam hal ini daerah perdesaan. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa

brain drain tidak hanya dipandang memberikan dampak negatif tetapi juga dapat memberikan dampak positif. Hasil penelitian dari Hagopian et al. (2004) memiliki pandangan negatif terhadap fenomena *brain drain*. Mereka melihat dari sisi ancaman terhadap ketersediaan sumber daya manusia berkualitas.

Ozden & Schiff (2006) memiliki pandangan positif terhadap fenomena *brain drain*. Mereka memandang pelaku *brain drain* akan memberikan keuntungan bagi negara asal berupa *capital input* dalam bentuk pengiriman uang kepada keluarga mereka di dalam negeri. Penulis mengadopsi hasil penelitian dari Hagopian et al. (2004), di mana penelitian ini memfokuskan pada dampak negatif dari fenomena *brain drain*.

Menurut Saefuloh (2012) salah satu strategi yang cukup relevan untuk mengatasi permasalahan *brain drain* di desa adalah dengan kebijakan *reserve brain*. Strategi ini berupaya untuk menarik kembali sumber daya manusia berkualitas yang terlanjur ke luar agar dapat mengembangkan kemampuan dan keahlian yang mereka miliki guna mendukung pembangunan desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dari berbagai sumber artikel, jurnal, buku, dan sumber referensi lain yang berkaitan dengan urbanisasi dan sumber daya manusia di desa. Sumber referensi berupa makalah, jurnal ilmiah yang dipublikasikan, dan *website* yang berkaitan dengan pembahasan tulisan ini.

Logika yang digunakan dalam penelitian ini adalah berkurangnya sumber daya manusia berkualitas di desa melalui urbanisasi berdampak pada disparitas kemiskinan antara desa dan kota. Hal tersebut disebabkan terhambatnya pembangunan desa karena kekurangan satu elemen penting yaitu sumber daya manusia berkualitas. Manakala pembangunan desa terhambat, maka desa semakin sulit untuk mengejar ketertinggalannya dengan kota, termasuk dalam hal mengatasi kemiskinan.

Penelitian lebih banyak memanfaatkan data sekunder untuk menganalisis keterkaitan antara urbanisasi, ketersediaan sumber daya manusia berkualitas, serta disparitas kemiskinan antara desa dan kota. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari sumber tertentu yang memiliki kewenangan dan kredibilitas mengeluarkan yaitu BPS. Data Statistik Migrasi Jawa Timur yang dirilis oleh BPS menjadi sumber data yang digunakan dalam tulisan ini. Adapun data statistik migrasi Jawa Timur yang digunakan adalah hasil Sensus Penduduk (SP) 2010 dan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015.

Guna memperoleh gambaran mengenai urbanisasi, maka data migrasi risen digunakan sebagai acuan dalam tulisan ini. Migran risen adalah mereka yang pernah pindah dalam kurun lima tahun terakhir (mulai dari lima tahun sebelum pencacahan). Keterangan ini diperoleh dari pertanyaan tempat tinggal tahun yang lalu dan tempat tinggal sekarang. Jika kedua tempat berlainan, maka dikategorikan sebagai migran risen yang merupakan bagian dari migrasi total, hanya waktunya dalam kurun lima tahun terakhir (Badan Pusat Statistik, 2019b). Penelitian ini membandingkan data migrasi risen Provinsi Jawa Timur hasil SP 2010 dan SUPAS 2015 (Badan Pusat Statistik, 2012 dan 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Brain Drain dan Ancaman Ketersediaan Sumber Daya Manusia Berkualitas Perdesaan

Dinamika urbanisasi di Provinsi Jawa Timur tidak dapat dilepaskan dari daya tarik Kabupaten/Kota yang ada. Perbedaan daya tarik antar Kabupaten/Kota menjadi salah satu penyebab terjadinya migrasi. Dalam hal ini data migrasi neto digunakan untuk mengetahui daya tarik sebuah daerah bagi kaum migran. Migrasi neto merupakan selisih antara jumlah migrasi masuk dengan migrasi ke luar. Apabila migrasi masuk lebih besar dari migrasi ke luar, maka disebut migrasi neto positif. Sebaliknya apabila

jumlah migrasi ke luar lebih besar daripada jumlah migrasi masuk, maka disebut migrasi neto negatif (Puspitasari, 2010). Daerah yang memiliki migrasi neto positif mengindikasikan memiliki daya tarik dibandingkan dengan daerah yang memiliki migrasi neto negatif. Beberapa daerah di Provinsi Jawa Timur tercatat memiliki angka migrasi positif, sebagian besar merupakan perkotaan.

Tabel 1.

Migrasi Penduduk Provinsi Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010

Kabupaten/ Kota	Migrasi		
	Masuk	Keluar	Netto
Kab. Kediri	24.711	93.850	-69.139
Kab. Malang	43.269	93.850	-50.581
Kota Surabaya	144.044	192.424	-48.380
Kab. Ponorogo	17.503	47.091	-29.588
Kab. Jember	24.102	53.034	-28.932
Kab. Pacitan	9.858	37.862	-28.004
Kab. Lamongan	18.240	45.644	-27.404
Kab. Ngawi	11.819	36.270	-24.451
Kab. Bangkalan	10.173	29.421	-19.248
Kab. Nganjuk	18.770	37.461	-18.691
Kab. Lumajang	9.478	26.901	-17.423
Kab. Sampang	5.936	22.718	-16.782
Kab. Bojonegoro	16.095	31.473	-15.378
Kab. Sumenep	2.932	17.256	-14.324
Kab. Banyuwangi	18.495	31.743	-13.248
Kab. Tuban	13.432	25.735	-12.303
Kab. Blitar	24.506	36.703	-12.197
Kab. Madiun	22.133	33.920	-11.787
Kab. Trenggalek	10.342	20.386	-10.044
Kab. Jombang	29.068	38.778	-9.710
Kab. Probolinggo	7.480	17.033	-9.553
Kab. Tulungagung	18.446	27.200	-8.754
Kab. Bondowoso	5.262	13.134	-7.872
Kab. Pamekasan	6.104	12.507	-6.403
Kab. Magetan	17.575	23.776	-6.201
Kab. Situbondo	8.758	8.522	236
Kota Blitar	10.205	9.116	1.089
Kota Kediri	14.868	13.765	1.103
Kota Pasuruan	6.095	4.207	1.888
Kab. Mojokerto	24.866	22.241	2.625
Kota Probolinggo	6.885	3.456	3.429
Kab. Pasuruan	28.352	24.730	3.622
Kota Mojokerto	8.333	4.376	3.957
Kota Batu	8.593	2.916	5.677
Kab. Gresik	29.478	22.763	6.715
Kota Madiun	12.527	4.830	7.697
Kota Malang	81.934	26.508	55.426
Kab. Sidoarjo	127.404	38.633	88.771

Sumber: BPS (2012)

Berdasarkan Tabel 1, terdapat 13 daerah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki angka migrasi neto positif. Jumlah tersebut terdiri dari delapan kota (Malang, Madiun, Batu, Mojokerto, Probolinggo, Pasuruan, Kediri, dan Blitar) dan lima kabupaten (Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, Mojokerto, dan Situbondo). Kota Surabaya tercatat sebagai satu-satunya kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki angka migrasi neto negatif. Meskipun demikian, kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Surabaya tercatat memiliki angka migrasi neto, bahkan Kabupaten Sidoarjo mencatatkan diri sebagai wilayah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki angka migrasi neto paling besar.

Lima tahun kemudian ketika dilakukan SUPAS 2015, terjadi sedikit perubahan terkait komposisi migrasi neto di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Jumlah daerah di Provinsi di Jawa Timur yang memiliki angka migrasi neto positif menjadi 15 daerah. Jumlah kota yang memiliki angka migrasi positif masih tetap delapan. Berbeda dengan Supas tahun 2015 ada tujuh kabupaten dengan karakteristik neto positif yaitu Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Blitar sebagaimana ditunjukkan Tabel 2.

Berdasarkan data hasil SP 2010 dan SUPAS 2015 tersebut, terlihat bahwa sebagian besar kota di Provinsi Jawa Timur masih memiliki daya tarik bagi kaum migran. Hal ini terlihat dari banyaknya migrasi masuk ke wilayah kota serta beberapa daerah yang berbatasan langsung dengan perkotaan seperti Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa terjadi urbanisasi di Provinsi Jawa Timur. Hasil SP 2010 mencatat tingkat urbanisasi di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010 sebesar 47,6% lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah sebesar 45,7% pada tahun yang sama (BPS Provinsi Jawa Timur, 2013). Adapun berdasarkan hasil SUPAS 2015 tingkat urbanisasi meningkat menjadi 51,1% (BPS, 2018).

Tabel 2.

Migrasi Penduduk Provinsi Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota Hasil Survei Penduduk Antar Sensus Tahun 2015

Kabupaten/ Kota	Migrasi		
	Masuk	Keluar	Netto
Kota Surabaya	109.985	156.941	-46.956
Kab. Jember	19.882	51.110	-31.228
Kab. Malang	52.382	77.458	-25.076
Kab. Bangkalan	4.024	27.233	-23.209
Kab. Nganjuk	18.633	35.117	-16.484
Kab. Lumajang	6.954	21.711	-14.757
Kab. Ngawi	19.352	33.881	-14.529
Kab. Lamongan	17.444	31.780	-14.336
Kab. Banyuwangi	32.662	46.296	-13.634
Kab. Bojonegoro	14.846	27.068	-12.222
Kab. Sumenep	7.462	19.672	-12.210
Kab. Kediri	32.624	42.699	-10.075
Kab. Pasuruan	18.144	26.976	-8.832
Kab. Ponorogo	20.979	27.239	-6.260
Kab. Situbondo	5.215	11.182	-5.967
Kab. Probolinggo	8.197	13.555	-5.358
Kab. Sampang	16.509	20.659	-4.150
Kab. Madiun	23.607	26.713	-3.106
Kab. Pamekasan	5.858	7.966	-2.108
Kab. Tuban	18.308	19.296	-988
Kab. Trenggalek	16.370	17.113	-743
Kab. Bondowoso	7.798	8.286	-488
Kab. Pacitan	12.658	12.890	-232
Kota Pasuruan	9.851	8.475	1.376
Kab. Blitar	32.512	29.753	2.759
Kab. Magetan	22.883	19.987	2.896
Kota Kediri	13.175	10.165	3.010
Kota Madiun	9.206	6.146	3.060
Kab. Jombang	36.346	33.131	3.215
Kab. Mojokerto	27.587	23.463	4.124
Kab. Tulungagung	22.808	18.619	4.189
Kota Blitar	11.207	6.794	4.413
Kota Mojokerto	7.631	1.892	5.739
Kota Batu	7.785	2.001	5.784
Kota Probolinggo	10.839	2.414	8.425
Kab. Gresik	40.180	29.643	10.537
Kota Malang	62.177	33.920	28.257
Kab. Sidoarjo	112.487	33.129	79.358

Sumber: BPS (2016)

Peningkatan urbanisasi yang terjadi di Provinsi Jawa Timur dalam lima tahun terakhir tentu perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, khususnya pemerintah. Menurut Taryono dkk. (2009) migrasi cenderung membuahkan kemiskinan khususnya di wilayah-wilayah pedalaman. Tanpa adanya penanganan yang serius, maka

Tabel 3.

Perbandingan Migran Provinsi Jawa Timur Menurut Kelompok Usia Hasil Sensus Penduduk 2010 dan Survei Antar Sensus Tahun 2015

Kelompok Usia (Tahun)	Jumlah Migran	
	SP 2010	SUPAS 2015
5-9	63.968	65.566
10-14	56.080	32.944
15-19	118.510	73.516
20-24	186.685	181.264
25-29	144.501	188.108
30-34	108.370	128.429
35-39	78.855	85.742
40-44	55.305	51.500
45-49	36.075	49.410
50-54	25.784	24.550
55-59	18.257	16.877
60-64	11.414	8.992
65-69	8.404	2.963
70-74	5.726	3.257
75+	7.182	3.449
Jumlah	925.116	916.567

Sumber: BPS (2016)

urbanisasi dikhawatirkan semakin memperburuk kemiskinan di daerah perdesaan. Akibatnya, disparitas kemiskinan antara desa dan kota di Provinsi Jawa Timur akan semakin melebar. Selanjutnya, perlu dibahas pula mengenai komposisi migran risen berdasarkan kelompok umur. Hal ini perlu dilakukan guna memperoleh gambaran mengenai migran risen pada usia produktif.

Berdasarkan Tabel 3, terlihat bahwa migran di Provinsi Jawa Timur sebagian besar masuk pada usia produktif (usia 15-64 tahun). Berdasarkan hasil SP 2010 jumlah migran usia produktif mencapai 783.756 jiwa, atau sebesar 84,72% dari 925.116 migran di Provinsi Jawa Timur. Jumlah migran usia produktif pada tahun 2015 tercatat meningkat. Berdasarkan hasil SUPAS 2015, jumlah migran usia produksi di Provinsi Jawa Timur tercatat 808.388 jiwa atau sebesar 88,20% dari 916.567 migran.

Komponen selanjutnya terkait dengan sumber daya manusia adalah tingkat pendidikan migran di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil SP 2010, jumlah migran yang telah menamatkan jenjang pendidikan menengah ke

atas tercatat sebanyak 453.691 jiwa atau 49,04% dari 925.116 migran. Dari jumlah tersebut, tercatat 104.793 migran atau sebesar 11,33% telah menamatkan pendidikan tinggi. Lima tahun kemudian jumlah migran yang telah menamatkan pendidikan menengah atas mengalami penurunan. Berdasarkan SUPAS 2015 jumlah migran yang menamatkan pendidikan menengah atas menjadi 443.736 jiwa atau 47,97% dari 916.567 migran. Meskipun demikian, terdapat fenomena yang menarik, di mana jumlah migran yang telah menamatkan pendidikan tinggi tidak mengalami penurunan. Jumlah migran yang telah menamatkan pendidikan tinggi tercatat 108.135 jiwa atau 11,69% (Tabel 4).

Fenomena yang terjadi pada tahun 2010 menggambarkan jumlah migran dengan pendidikan D-IV/S-1 tercatat sebanyak 71.074 jiwa atau 7,68%; maka pada tahun 2015 meningkat menjadi 8,22% atau 76.035 jiwa. Peningkatan ini tidak terjadi pada jenjang pendidikan D-I/II/III maupun S-2/S-3. Jumlah migran yang telah menamatkan pendidikan pada kedua jenjang tersebut pada tahun 2015 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2010. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa migran risen di Jawa Timur yang telah menamatkan pendidikan tinggi paling banyak pada jenjang D-IV/S-1.

Tabel 4.

Perbandingan Migran Provinsi Jawa Timur Menurut Tingkat Pendidikan Hasil Sensus Penduduk 2010 dan Survei Antar Sensus

Tingkat Pendidikan	Jumlah Migran	
	SP 2010	SUPAS 2015
Tdk/Blm Pernah Sekolah	36.791	33.832
Tdk/Blm Tamat SD	92.226	101.612
SD	159.388	142.239
SMP	183.020	195.148
SMA/SMK	348.898	335.601
D I/II/III	28.951	28.206
D IV/S1	71.074	76.035
S2/S3	4.768	3.894
Total	925.116	916.567

Sumber: BPS (2016)

Urbanisasi yang terjadi di Provinsi Jawa Timur secara tidak langsung mengancam ketersediaan sumber daya manusia usia produktif di desa. Dilihat dari ketersediaan angkatan kerja di desa, maka urbanisasi didominasi migran pada kelompok usia produktif. Apabila kondisi ini tidak segera mendapat perhatian serius, maka desa akan terancam kekurangan penduduk usia produktif. Kondisi ini tentunya juga akan mengancam pertumbuhan ekonomi di desa karena kekurangan sumber daya manusia untuk menggerakkan pembangunan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Anwar & Fatmawati (2018) bahwa jumlah penduduk usia produktif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Selain dari segi ketersediaan penduduk usia produktif, urbanisasi yang terjadi juga mengancam ketersediaan sumber daya manusia berkualitas di desa. Hal ini terlihat dari data terkait tingkat pendidikan migran. Uraian tentang peningkatan migran risen yang telah menamatkan pendidikan tinggi pada tahun 2015 memperlihatkan bahwa migrasi intelektual di Provinsi Jawa Timur juga meningkat.

Hasil penelitian dari Gibson & Mckenzie (2012) mampu memperlihatkan fenomena *brain drain* pada tataran negara. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa sebagian besar migran yang berkualitas dari negara miskin banyak melakukan migrasi ke luar negeri. Apabila konteks tersebut diperkecil pada tataran provinsi, maka uraian migrasi intelektual yang terjadi di Provinsi Jawa Timur dapat diindikasikan sebagai proses *brain drain*.

Arus urbanisasi pada kalangan migran intelektual tentu merupakan kehilangan besar bagi desa. Ketiadaan sumber daya manusia berkualitas (migran intelektual) tentu dapat memengaruhi keberlangsungan pembangunan di desa. Hal tersebut dikarenakan terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan pembangunan desa sebagaimana dikemukakan

Widyaningsih (2013). Tinggi rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat berhubungan dengan tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas di desa dengan demikian memegang peranan yang sangat penting bagi maju dan berkembangnya desa.

Ketiadaan sumber daya manusia berkualitas di desa yang tercermin dari meningkatnya migran usia produktif dan migran intelektual selama lima tahun terakhir menjadi ancaman serius bagi pembangunan desa. Desa secara tidak langsung sedang mengalami defisit modal manusia sebagai elemen penting dalam melakukan pembangunan. Ketiadaan modal manusia yang mumpuni akan menjadikan pertumbuhan ekonomi desa tidak dapat bergerak maksimal. Kurang maksimalnya pertumbuhan ekonomi akan memberikan dampak bagi pembangunan di desa.

Kondisi *brain drain* yang sedang terjadi pada desa-desa di Provinsi Jawa Timur sejalan dengan temuan Anwar (2017) bahwa modal manusia memiliki kontribusi yang positif dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi regional di Pulau Jawa. Pendidikan menjadi salah satu sumber utama untuk mencapai pembangunan ekonomi yang lebih baik. Dengan demikian, kepergian migran intelektual tentu berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi di perdesaan. Manakala desa tidak dapat melakukan pembangunan, selanjutnya akan berpengaruh terhadap upaya mengatasi kemiskinan di desa. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Sari dkk. (2017), di mana terdapat korelasi negatif antara pembangunan infrastruktur terhadap kemiskinan di Kota Tangerang.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, pemerintah dan *stakeholder* perlu memberikan perhatian yang serius terhadap persoalan urbanisasi. Tanpa adanya usaha pengendalian arus urbanisasi, maka banyak desa di Provinsi Jawa Timur berpotensi terancam kekurangan modal manusia. Kelangkaan sumber daya

manusia berkualitas sebagai modal penting pembangunan tentu akan menyebabkan desa mengalami kesulitan untuk mengejar ketinggalannya. Apabila kondisi seperti ini dibiarkan terus berlanjut tanpa ada upaya yang serius, maka kesenjangan kemiskinan antara desa dan kota semakin melebar.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengendalikan urbanisasi di wilayahnya. Dengan bekerjasama dengan kabupaten/kota yang ada, pemerintah perlu segera merumuskan kebijakan yang tepat bagi pengendalian urbanisasi. Kebijakan yang dipilih diharapkan tidak hanya mampu mengendalikan arus urbanisasi tetapi juga mengurangi daya dorong yang dimiliki desa serta daya tarik kota.

Kebijakan yang ditempuh juga diharapkan mampu merubah wajah urbanisasi yang terjadi di Provinsi Jawa Timur. Urbanisasi yang selama ini identik dengan dampak negatif, baik bagi kota terlebih bagi desa, diharapkan dapat memberikan dampak positif yang saling menguntungkan baik bagi desa maupun kota di Provinsi Jawa Timur.

Reserve Brain dan Pembangunan Desa: Strategi Mengatasi Disparitas Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur

Guna mendukung kebijakan *reserve brain* di Provinsi Jawa Timur diperlukan berbagai langkah strategis. Pertama, kebijakan pembangunan diupayakan tidak kontra-produktif dengan kebijakan *reserve brain*. Pemerintah perlu melakukan kajian secara komprehensif terhadap suatu kebijakan yang akan dibuat, termasuk mempertimbangkan dampak sosial yang akan ditimbulkan. Kebijakan pembangunan harus dilakukan secara selektif, sehingga pembangunan dapat memberikan dampak positif, baik bagi kota maupun desa. Jangan sampai kebijakan pembangunan yang dijalankan pemerintah malah membuka keran urbanisasi semakin lebar. Fakta yang ada memperlihatkan bahwa tidak sedikit kebijakan pembangunan yang dipilih pemerintah malah mengakselerasi urbanisasi.

Penelitian dari Novenanto (2018) tentang kebijakan pembangunan tol trans Jawa menunjukkan adanya realitas tersebut. Kebijakan yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ternyata membawa dampak terhadap urbanisasi. Hasil penelitian yang dilakukan memperlihatkan bahwa tidak terdapat hubungan langsung antara pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur Trans Jawa malah menjadi katalisator bagi terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Keberadaan tol trans Jawa malah mempercepat proses urbanisasi dan modernisasi. Manakala urbanisasi menjadi semakin cepat, maka tidak dapat dipungkiri akan memberikan dampak bagi terjadinya *brain drain* bagi desa.

Kedua, mengurangi faktor pendorong dan faktor penarik terjadinya urbanisasi. Sebagaimana diketahui bahwa urbanisasi tidak dapat dilepaskan dari adanya faktor pendorong dari desa dan faktor penarik dari kota. Menurut teori migrasi yang dikemukakan oleh Lee dalam Mantra (2000), volume migrasi di suatu wilayah berkembang sesuai dengan keanekaragaman daerah wilayah tersebut. Pada daerah asal dan daerah tujuan terdapat faktor-faktor positif dan negatif. Perbedaan nilai kumulatif antara kedua tempat tersebut, cenderung menimbulkan arus migrasi penduduk. Pemerintah perlu segera mengidentifikasi berbagai faktor pendorong (negatif) dan penarik (positif) terjadinya urbanisasi di Provinsi Jawa Timur. Manakala kedua faktor tersebut telah teridentifikasi, maka langkah selanjutnya akan lebih mudah.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi faktor pendorong adalah dengan membuat ruang bagi upaya penciptaan lapangan kerja di desa. Namun demikian, upaya tersebut hendaknya tetap memperhatikan potensi yang dimiliki oleh desa, baik potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Harapannya, lapangan kerja yang terbentuk dapat mengakomodir sumber daya yang tersedia. Pembukaan lapangan kerja di

desa secara tidak langsung diharapkan dapat memperkuat perekonomian desa. Upaya lain yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka memperkuat perekonomian desa adalah dengan memberikan peran kepada migran intelektual yang bersedia kembali. Mereka tentunya memiliki modal sosial yang lebih, jika dibandingkan dengan penduduk yang tidak pernah melakukan migrasi, salah satunya adalah jaringan sosial. Pelaku *brain drain* dapat ditempatkan pada posisi fasilitator dalam pembangunan desa.

Ketiga, pembentukan dan pemeliharaan jaringan diaspora, baik jaringan diaspora yang bersifat keilmuan, maupun yang bersifat komunitas kemasyarakatan. Jaringan diaspora tersebut dapat menjadi media untuk mendapatkan sumber potensi cukup besar yang dibutuhkan untuk menjalin kerjasama antara desa dengan kota. Harapan dari keberadaan diaspora adalah terjalin kerjasama yang lebih efektif dan saling menguntungkan. Salah satu tantangan yang perlu diperhatikan dalam jaringan diaspora adalah bentuk kontribusi yang diberikan. Keberadaan komunitas diaspora tersebut harus dikondisikan agar benar-benar dapat berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan desa. Dengan demikian, dalam pembentukan dan pemeliharaan jaringan diaspora, orientasi kepentingan desa perlu ditanamkan dan dipelihara sejak awal.

Manakala sumber daya manusia berkualitas kembali tersedia di desa, maka kebutuhan utama desa untuk melakukan pembangunan dapat terpenuhi. Pemenuhan kebutuhan tersebut tentu akan menjadikan pembangunan desa kembali bergeliat, sehingga dapat memberikan dampak bagi upaya mengatasi kemiskinan. Melalui pembangunan desa yang berkualitas dan memberikan dampak signifikan bagi upaya mengatasi kemiskinan, maka upaya untuk mempersempit disparitas kemiskinan desa dengan kota dapat diwujudkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil SP 2010 maupun SUPAS 2015 memperlihatkan adanya *brain drain* di Provinsi Jawa Timur. Fenomena tersebut tentunya mengancam ketersediaan sumber daya manusia berkualitas di desa. Jumlah migran yang terampil dan memiliki tingkat pendidikan tinggi di Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu lima tahun meningkat dari 11,33% pada tahun 2010 menjadi 11,69% pada tahun 2015. Manakala fenomena tersebut tidak segera mendapat perhatian serius, maka dapat dipastikan di masa mendatang desa kekurangan sumber daya manusia berkualitas, yaitu sumber daya manusia produktif dan intelektual.

Berkurangnya sumber daya manusia berkualitas di desa akan memberikan dampak bagi upaya pembangunan desa. Tanpa adanya pembangunan desa maka upaya mengatasi kemiskinan tidak dapat terwujud. Dampaknya disparitas kemiskinan antara desa dan kota di Provinsi Jawa Timur semakin melebar. Dengan demikian, diperlukan berbagai upaya untuk kembali memenuhi kebutuhan sumber daya manusia berkualitas di desa.

Reserve brain menjadi salah satu upaya yang relevan untuk mengatasi ancaman *brain drain* di Provinsi Jawa Timur. Guna mewujudkan hal tersebut diperlukan beberapa langkah antara lain: (1) menghindari kebijakan pembangunan yang kontraproduktif dengan upaya *reserve brain*. Tidak jarang, kebijakan pembangunan yang dibuat malah semakin mengakselerasi urbanisasi dan *brain drain*; (2) mengurangi faktor pendorong dan faktor penarik urbanisasi; dan (3) membentuk dan memelihara jaringan diaspora.

DAFTAR PUSTAKA

Aeni, N. (2017). Eksistensi Buruh Migran Perempuan dan Gambaran Kemiskinan Kabupaten Pati. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK*, XIII(2), 139–148.

- Anwar, A. (2017). Peran Modal Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Jawa. *Jurnal Economia*, 13(1), 79–94.
- Anwar, K., & Fatmawati. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk Usia Produktif, Kemiskinan dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomin di Kabupaten Bireuen. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 01(01), 15–22.
- Badan Pusat Statistik. (2012). *Statistik Migrasi Jawa Timur Hasil Sensus Penduduk 2010*. Jakarta: Subdirektorat Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2013). *Proyeksi Penduduk Indonesia (Indonesia Population Projection 2010-2035)*. Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Statistik Migrasi Jawa Timur Hasil Survei Penduduk Antar Sensus 2015*. Jakarta: Subdirektorat Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 Hasil SUPAS 2015* (S. S. D. BPS & K. PPN/Bappenas, Eds.). Jakarta: Subdirektorat Statistik Demografi BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2019a). *Jumlah Penduduk Miskin menurut Provinsi, 2007-2019*. BPS RI. <https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/01/18/1119/jumlah-penduduk-miskin-menurut-provinsi-2007-2019>. Diakses tanggal 5 September 2019.
- Badan Pusat Statistik. (2019b). *Deskripsi Istilah Statistik*. https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah_page=38&Istilah_sort=deskripsi_ind.desc. Diakses tanggal 30 Juli 2019.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Persentase Penduduk Miskin menurut Provinsi 2007-2019*. <https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/08/18/1219/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi-2007---2019.html>. Diakses Tanggal 10 Januari 2020.
- Christiaensen, L., & Todo, Y. (2013). *Poverty Reduction during the Rural-Urban Transformation The Role of the Missing Middle* (No. 6445). <http://documents.worldbank.org/curated/en/215021468151498716/Poverty-reduction-during-the-rural-urban-transformation-the-role-of-the-missing-middle>.
- Febrianto, S., & Syahbana, J. A. (2016). Urbanisasi dan Pengurangan Kemiskinan di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan. *Jurnal Teknik PWK*, 5(1), 51–57.
- Friana, H. (2019). Pendatang Baru Jakarta dan Lambatnya Pembangunan Desa. *Tirto Id*. <https://tirto.id/pendatang-baru-jakarta-dan-lambatnya-pembangunan-desa-ecg2>
- Gibson, J., & Mckenzie, D. (2012). The Economic Consequences of “Brain Drain” of the Best and Brightest: Microeconomic Evidence from Five Countries. *Economic Journal*, 122(560), 339–375.
- Hagopian, A., Thompson, M. J., Fordyce, M., Johnson, K. E., & Hart, L. G. (2004). The migration of Physicians from Sub-Saharan Africa to the United States of America: Measures of the African Brain Drain. *Human Resources for Health*, 2(17), 1–10.
- Istiqamah, Syaparuddin, & Rahmadi, S. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan (Studi Provinsi-Provinsi di Indonesia). *E-Jurnal Perpektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 7(3), 111–126.
- Lest, T. P. A. (2016). *Analisis Disparitas Regional di Provinsi Jawa Timur* (Tugas Akhir). UGM. http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=101409&obyek_id=4.
- Macours, K., & Swinnen, J. F. M. (2008). Rural-Urban Poverty Differences in Transition Countries. *World Development*, 36(11), 2170–2187.

- Mankiw, N. G., Romer, D., & Weil, D. N. (1992). A Contribution to the Empirics of Economic Growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 107(2), 407–437.
- Mantra, I. B. (2000). *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Masfufah. (2013). Konvergensi dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Disparitas Wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 15(2), 194–202.
- Novenanto, A. (2018). Trans Jawa, Pertumbuhan Ekonomi dan Urbanisasi. *Bhumi: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 4(2), 123–139.
- Ozden, C., & Schiff, M. (2006). International Migration, Remittances & The Brain Drain. In C. Ozden & M. Schiff (Eds.). *The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank*. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-6372-0>
- Puspitasari, A. W. (2010). *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Minat Migrasi Sirkuler ke Kabupaten Semarang* (Tesis). Universitas Diponegoro.
- Saefuloh, A. A. (2012). Kebijakan Reverse Brain: Mengapa Penting dan Alternatif Pendekatan. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 109–124.
- Sari, R. M., Maqdi, I. A., & Syahbandar, M. Y. (2017). *Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Kemiskinan Kota Tangerang*. Prosiding Seminar Nasional Perencanaan Pembangunan Inklusif Desa-Kota. Padang: Universitas Andalas.
- Siregar, R. (2017). *Sumber Daya Manusia dalam Pembangunan Nasional*. Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Medan: Universitas Negeri Medan
- Sugiyarto, Mulyo, J. H., & Seleky, R. N. (2015). Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Rumah Tangga di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Agro Ekonomi*, 26(2), 115–120.
- Taryono, Iyan, R. Y., & Ningsih, R. B. (2009). Studi tentang Migrasi dan Implikasinya terhadap Kemiskinan di Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Ekonomi*, 17(2), 120–131.
- Widyaningsih, N. D. (2013). Hubungan antara Tingkat Pendidikan Masyarakat dengan Kesadaran Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi Korelasi di Desa Temuwangi Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten Tahun 2009-2010).

BIODATA PENULIS

Munari Kustanto, lahir pada tanggal 25 Mei 1982 di Kota Surabaya. Magister Sosiologi dari Universitas Airlangga Surabaya. Saat ini berkarir sebagai Peneliti Muda di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Fitriyatus Sholihah, lahir pada tanggal 12 September 1985 di Kabupaten Sidoarjo. Sarjana Statistik dari Universitas Brawijaya Malang. Saat ini berkarir sebagai Peneliti Pertama di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo.

